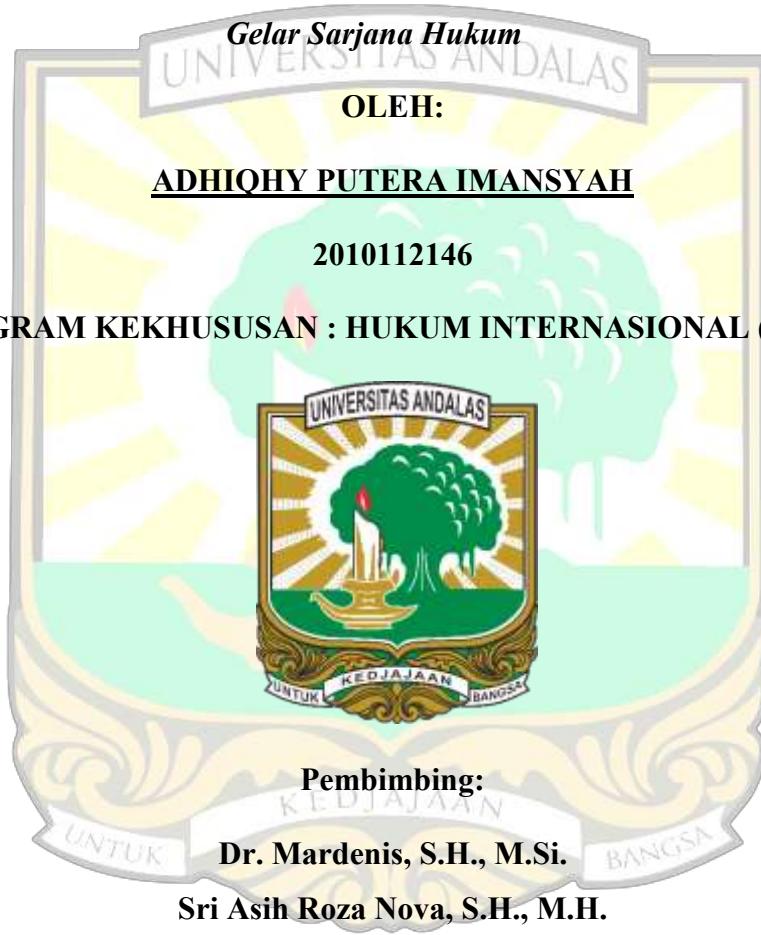


SKRIPSI
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RELAWAN
INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA OLEH *INTERNATIONAL*
COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC)

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

	No. Alumni Universitas	Adhiqhy Putera Imansyah	No. Alumni Fakultas
a. Tempat/Tgl Lahir : Padang/24 Desember 2002 b. Nama Orang Tua : Syaharman c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Internasional e. NIM : 2010112146	f. Tanggal Lulus : 12 November 2024 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun 3 Bulan i. IPK : 3.82 j. Alamat : J.I.S.Parman no.96B, Kota Padang, Sumatera Barat.		

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RELAWAN INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA OLEH INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC)

(Adhiqhy Putera Imansyah, 2010112146, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 85 halaman, 2024)

ABSTRAK

Relawan internasional berperan penting dalam bencana dan konflik bersenjata, namun sering menghadapi risiko tinggi yang membahayakan nyawa. Pelanggaran terhadap perlindungan relawan internasional menurut Hukum Humaniter Internasional (HHI) perlu perhatian serius. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 mengatur perlindungan ini, dengan mandat kepada *International Committee of the Red Cross* (ICRC) dan *National Society* (NS) untuk memastikan keselamatan relawan internasional. ICRC bekerja sama dengan NS dalam perlindungan dan pertanggungjawaban atas relawan internasional sesuai dengan mandat dari *Seville Agreement*. Meskipun demikian, pelanggaran terhadap aturan HHI masih sering terjadi, yang dapat berakibat fatal bagi relawan. Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana pengaturan Hukum Humaniter Internasional tentang perlindungan terhadap relawan internasional? *Kedua*, Bagaimana implementasi perlindungan terhadap relawan internasional oleh *International Committee of the Red Cross* (ICRC) dan pertanggungjawabannya melalui *National Society* (NS)? Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dan bersifat deskriptif. Penelitian ini menarik beberapa kesimpulan yakni, berdasarkan Pasal 13 Konvensi Jenewa 1949 serta Pasal 10 dan 11 Protokol Tambahan 1977 telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi warga sipil dalam hal ini termasuk relawan internasional dan menegaskan bahwa mereka tidak boleh diserang serta harus diperlakukan secara manusiawi. Kurang efektifnya sanksi yang dijatuahkan terhadap para pelanggar menjadi tantangan dalam pengimplementasian aturan-aturan HHI. Untuk itu, dalam hal edukasi dan advokasi terkait aturan HHI, ICRC sebagai lembaga kemanusiaan mengambil peran sebagai lembaga yang mempromosikan aturan HHI secara merata dan menyeluruh serta menjaga perdamaian dalam terjadi konflik bersenjata. Di sisi lain, perlindungan terhadap relawan internasional menjadi tanggung jawab *National Society* (NS) sebagai perpanjangan tangan gerakan internasional kemanusiaan sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 *Seville Agreement*.

Kata Kunci: Perlindungan, Relawan Internasional, ICRC

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Pengaji dan dinyatakan lulus pada 12 November 2024.

Pengaji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama	Magdariza, S.H., M.H.	Sri Oktavia, S.H., M.Sc., Ph.D.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Internasional: **Dr. Delfiyanti, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

No. Alumni University	Adhiqhy Putera Imansyah	No. Alumni Faculty
a. Place/Date of Birth : Padang/December 24, 2002 b. Parent Name : Syaharman c. Faculty : Law d. Concentration : International Law e. NIM : 2010112146	f. Graduation Date : November 12, 2024 g. Pass Predicate : With Honors h. Length Of Study : 4 Years 3 Months i. GPA : 3.82 j. Address : S.Parman Street No. 96, Padang City, West Sumatra	

LEGAL PROTECTION REGULATIONS FOR INTERNATIONAL VOLUNTEERS AND THEIR IMPLEMENTATION BY THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC)

(Adhiqhy Putera Imansyah, 2010112146, Faculty of Law Andalas University, 85 pages, 2024)

ABSTRACT

International volunteers play a crucial role in disaster response and armed conflicts, yet they often face significant risks to their lives. Violations of the protection of international volunteers under International Humanitarian Law (IHL) require serious attention. The 1949 Geneva Conventions and the 1977 Additional Protocols provide a legal framework for this protection, entrusting the International Committee of the Red Cross (ICRC) and National Societies (NS) with the responsibility to ensure the safety of international volunteers. The ICRC collaborates with NS in the protection and accountability of international volunteers in accordance with the mandate established by the Seville Agreement. However, violations of IHL continue to occur, which can have fatal consequences for volunteers. Based on this background, the research questions are as follows: *first*, How does International Humanitarian Law regulate the protection of international volunteers? *Second*, How is the protection of international volunteers implemented by the International Committee of the Red Cross (ICRC) and its accountability through National Societies (NS)? This study adopts a normative-empirical approach and is descriptive in nature. The study concludes that Articles 13 of the 1949 Geneva Conventions and Articles 10 and 11 of the 1977 Additional Protocols provide a comprehensive legal framework to protect civilians, including international volunteers, affirming that they must not be attacked and must be treated humanely. However, the ineffectiveness of sanctions against violators presents a challenge in the implementation of IHL provisions. In this regard, the ICRC plays a key role in the education and advocacy of IHL, promoting its principles uniformly and comprehensively, while ensuring peace during armed conflicts. On the other hand, the protection of international volunteers is the responsibility of National Societies (NS) as the extension of the international humanitarian movement, pursuant to Article 8 point 2 of the Seville Agreement.

Keywords: Protection, International Volunteer, ICRC

This Minor Thesis has been successfully defended and regarded to graduate by November 12, 2024.

Examiner,

Signature	1. 	2. 
Name	Magdariza, S.H., M.H.	Sri Oktavia, S.H., M.Sc., Ph.D.

Acquainted,

Head of the Department of International Law: **Dr. Delfiyanti, S.H., M.H.**



Alumni has been registered in the Faculty/University under the number:

No. Alumni Faculty	Faculty/University:	
No. Alumni University	Name:	Signature:
	Name:	Signature: